



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BULAN K3 NASIONAL 2026 PT PETROKIMIA GRESIK
Membangun Ekosistem Pengelolaan
K3 Nasional Yang Profesional,
Inovatif, dan Kolaboratif



LKjIP 2025

Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Lamongan

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 63A Lamongan
Kode Pos 62214 Telp. (0322) 316147
e-mail : disnaker@lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran berakhir berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan. Laporan ini diharapkan menjadi tolok ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terkait dengan penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, sebagaimana yang disepakati pada tahun awal anggaran. Selanjutnya pengukuran kinerja tersebut dilihat berdasarkan indikator kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada Renstra OPD dan Renja OPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan. Dari hasil Pengukuran Kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Harapan kami semoga LKjIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparatur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Lamongan, Januari 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN



M. ZAMRONI, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730707 199303 1 010

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tugas, Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi | 4 |
| C. Data Umum Organisasi..... | 13 |
| 1. Personil | 13 |
| 2. Sarana dan Prasarana..... | 14 |
| 3. Pembiayaan..... | 16 |
| D. Sistematika Penyajian LKjIP | 16 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA..... | 18 |
| A. Rencana Strategis | 18 |
| 1. Tujuan | 20 |
| 2. Sasaran dan Indikator Sasaran..... | 21 |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2025 Program dan Kegiatan | 22 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... | 29 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 31 |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | 31 |
| 1. Pencapaian Kinerja Tujuan | 31 |
| 2. Pencapaian Kinerja Sasaran..... | 32 |
| B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA | 33 |
| 1. Realisasi Kinerja Tujuan | 33 |
| 2. Realisasi Kinerja Sasaran | 33 |
| C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D AKHIR PERIODE RENSTRA | 34 |
| 1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan | 34 |
| 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran | 35 |
| D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL | 36 |
| 1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan | 36 |
| 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran | 37 |
| E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN YANG TELAH DILAKUKAN | 38 |
| F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI..... | 39 |
| 1. Permasalahan | 39 |
| 2. Solusi..... | 39 |
| G. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA | 40 |
| H. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN PENCAPAIAN KINERJA..... | 51 |
| BAB IV PENUTUP..... | 53 |
| A. Kesimpulan..... | 53 |
| B. Saran/Rekomendasi | 54 |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, penyusunan dan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian di Kabupaten Lamongan, peningkatan kapasitas yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan rencana strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Dinas Tenaga Kerja, pada tahun 2025 diwujudkan dalam 6 program, 18 kegiatan dan 39 sub kegiatan.

Uraian program-program Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2025 sebagai berikut yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 2) Program Perencanaan Tenaga Kerja, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), dengan Sub Kegiatan :
 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.
- 3) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, dengan Sub Kegiatan :
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota.
 - b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dengan Sub Kegiatan :
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
 - c. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil, dengan Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil.
 - d. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- 4) Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan kegiatan :
 - a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Pelayanan antar Kerja;
 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
 - Perluasan Kesempatan Kerja.
 - b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dengan Sub Kegiatan :
 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;

- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;
- Job Fair/Bursa Kerja.
- c. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI);
 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran;
 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.
- 5) Program Hubungan Industrial, dengan kegiatan :
 - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
 - b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.
- 6) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dengan kegiatan :
 - a. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Penyuluhan Transmigrasi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep pembangunan merupakan suatu upaya terarah, sistematis yang dilakukan menuju perubahan yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Perubahan yang dimaksud adalah gerakan menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.

Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan manifestasi tanggungjawab Pemerintah sebagai urusan wajib dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Masyarakat yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan. Pada gilirannya diharapkan upaya ini mampu meningkatkan masyarakat pencari kerja dalam melaksanakan peran dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Lamongan, komitmen pembangunan di bidang ketenagakerjaan tersebut telah menjadi agenda utama pembangunan tahun 2022-2026 yaitu upaya perluasan dan penempatan tenaga kerja serta peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Untuk merealisasikan agenda tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan membentuk Dinas Tenaga Kerja. Pembentukan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan menyelenggarakan Pembangunan Ketenagakerjaan yang mencakup Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan

Industrial, dan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan di bidang Tenaga Kerja, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, tiap akhir tahun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasar pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan merupakan perwujudan kewajiban Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian Visi dan Misi yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan. Pengukuran kinerja tersebut di samping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai sistem lacak kinerja masing-masing program pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau kurang.

B. Tugas, Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas :

1. Merumuskan kebijakan teknis dan strategis;
2. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi :

1. Perumusan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, Laporan Keuangan, LPPD, dan LKPJ Dinas;
2. Perumusan dan penetapan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas yang meliputi kesekertariatan, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, informasi pasar kerja dan peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, transmigrasi serta Unit Pelaksanaan Teknis dan Jabatan fungsional;
4. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
5. Penyelenggaraan fasilitas program kesekertariatan, hubungan industrial dan jaminan soasial tenaga kerja, informasi pasar kerja dan peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, transmigrasi serta Unit Pelaksanaan Teknis dan Jabatan fungsional;
6. Penyampaian laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
7. Pembinaan administrasi dinas di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;

8. Pengoordinasian dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
9. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping unsur pimpinan, unsur staf dan pelaksana juga mempunyai tugas sebagai berikut:

1) **Sekretariat**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan umum dan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- g. Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- i. Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan Renstra, LKjIP, LPPD, dan LKPJ Dinas;
- j. Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

- I. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitas di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat mempunyai 3 Sub Bagian;

1) **Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi** mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Dinas;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LPPD, LKPJ Dinas;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur, dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkungan Dinas;
- h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) **Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;

- d. Melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
- e. Melaksanakan verifikasi keuangan;
- f. Melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban serta laporan keuangan.
- g. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Keuangan Dinas; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, peeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan pertatausahaan aset Dinas;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- g. Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) **Bidang Pelatihan Kerja**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang Pelatihan Kerja yang meliputi penyelenggaraan pelatihan dan kompetensi sumber daya manusia, verifikasi regulasi, serta pemberian tanda daftar dan izin lembaga pelatihan.

Bidang Pelatihan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- b. Penyelenggaraan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. Pengkoordinasian peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- d. Pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- e. Pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan di perusahaan;
- f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) **Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pengolahan informasi pasar kerja, pengelolaan dan pemantauan produktivitas usaha.

Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja dalam (1) satu daerah;
- b. Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan;
- c. Pengkoordinasian pelayanan konsultasi produktivitas kepada perusahaan;
- d. Pengkoordinasian pengukuran dan pemantauan produktivitas tingkat daerah;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang bimbingan dan penyuluhan jabatan antar kerja, pelayanan perantara kerja, pelayanan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, dan perizinan menggunakan tenaga kerja asing dan transmigrasi.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- b. Pengoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- c. Pengoordinasi perantara kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- d. Penyelenggaraan verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja;
- e. Penyelenggaraan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- f. Pengoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon Tenaga Kerja Indonesia;
- g. Pengoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri;
- h. Pengoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- i. Pengoordinasian penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Indonesia pra dan purna penempatan;
- j. Pengoordinasian pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia;
- k. Penyelenggaraan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia purna;
- l. Pengoordinasian fasilitasi penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- m. Penyelenggarakan kegiatan transmigrasi; dan

- n. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Mempunyai tugas melaksanakan tugas perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang verifikasi peraturan perusahaan, fasilitas perjanjian kerja, pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan perusahaan, pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama Bipartit perusahaan, dan pelaksanaan mediasi perselisihan dan mogok kerja perusahaan.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/kota;
- b. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kabupaten/kota;
- c. Pengoordinasian proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/kota;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama Bipartit di perusahaan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- g. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

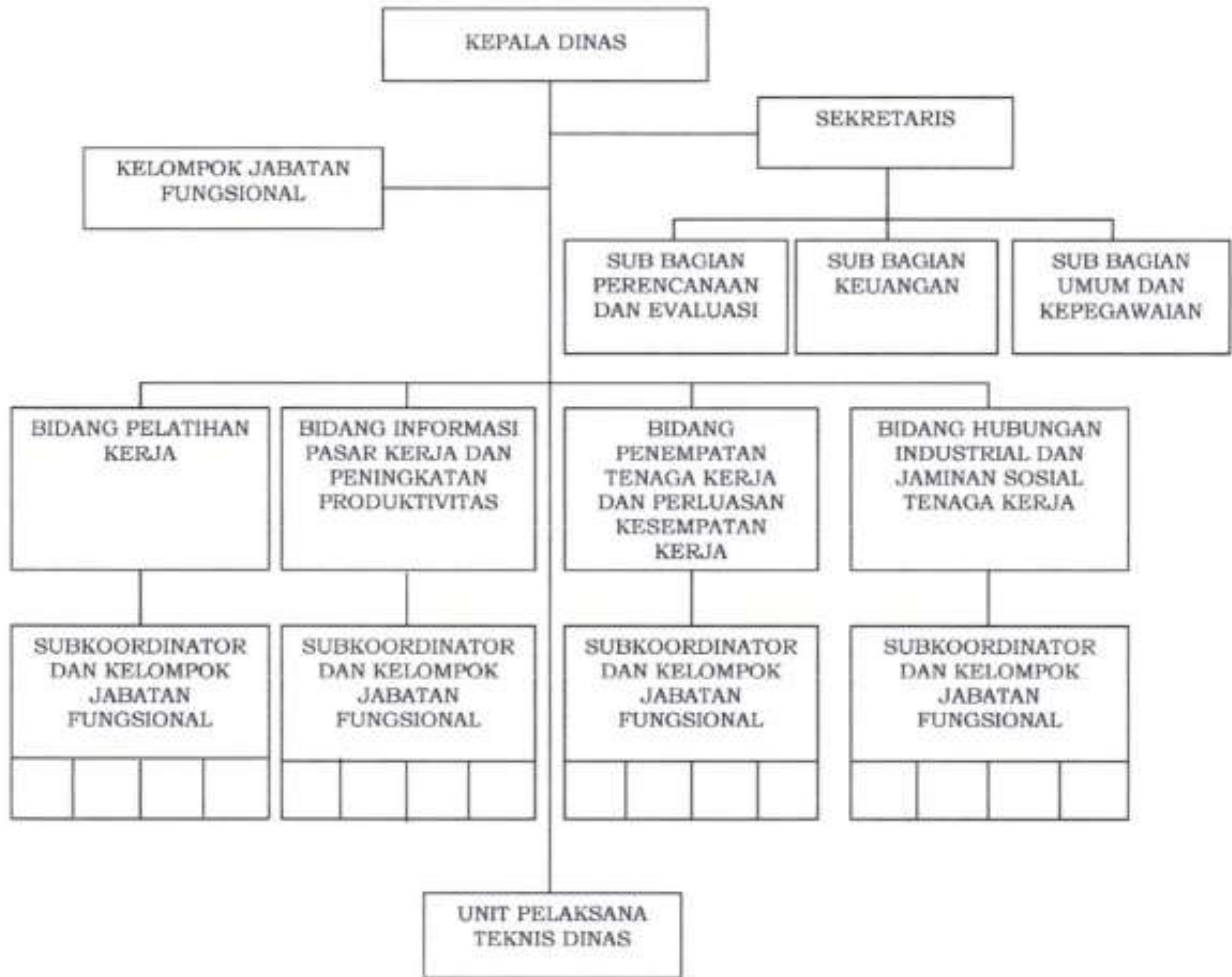
6) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/kegiatan teknis penunjang pada Dinas.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tertinggi pratama. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN



Sumber : Peraturan Bupati Lamongan Nomor 76 Tahun 2021

C. Data Umum Organisasi

1. Personil

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan didukung oleh 66 PNS dan 2 Tenaga Kontrak, yang mempunyai latar belakang pendidikan mulai dari SD sampai dengan Magister (S2).

Tabel 1.1
Data Kepegawaian
Berdasarkan Jabatan, Pangkat/Golongan serta Jenjang Pendidikan Tahun 2025

| No | Jabatan Struktural | Pangkat / Gol. Ruang | Pendidikan Formal | Jumlah | Ket |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| 1 | Kepala | Pembina Utama Muda (IV/c) | S2 | 1 | |
| 2 | Sekretaris | Pembina (IV/a) | S2 | 1 | |
| 3 | Kepala Bidang | Pembina (IV/a) Penata Tk. I (III/d) | S2 S1 | 3 1 | |
| 4 | Kasubag | Pembina (IV/a) Penata Tk.I (III/d) | S2 S1 | 1 2 | |
| 5 | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) | Pembina (IV/a) Penata Tingkat I (III/d) Penata Muda Tingkat I (III/b) Penata Muda (III/a) | S2 S2 S1 S1 | 1 3 6 4 7 | |
| 6 | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | Penata Muda Tingkat I (III/b) Penata Muda (III/a) Pengatur (II/c) Pengatur Muda (II/a) | SI S1 D3 SMP | 1 1 1 1 | |
| 7 | PPPK | IX VII V I | S1 D3 SMA SD | 24 1 6 1 | |
| 8 | Tenaga Kontrak | | SI | 2 | |
| JUMLAH | | | | 68 | |

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung Kegiatan tugas sehari-hari, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dilengkapi dengan sarana dan prasarana.

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2025

| No | Nama Barang / Jenis Barang | Jumlah Barang Unit/Buah | Harga | Ket |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Alat Angkutan | | 958.442.957,00 | |
| 1.1 | Alat Angkutan Darat Bermotor | | 955.457.957,00 | |
| 1.1.1 | Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 3 | 565.534.000,00 | |
| 1.1.2 | Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 1 | 250.000.000,00 | |
| 1.1.3 | Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 18 | 139.923.957,00 | |
| 1.2 | Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | 2.985.000,00 | |
| 1.2.1 | Kendaraan Tak Bermotor Penumpang | 1 | 2.985.000,00 | |
| 2 | Alat Bengkel dan Alat Ukur | | 13.125.500.109,00 | |
| 2.1 | Alat Bengkel Bermesin | | 13.068.753.109,00 | |
| 2.1.1 | Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi | 911 | 12.219.544.234,00 | |
| 2.1.2 | Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) | 8 | 7.040.000,00 | |
| 2.1.3 | Perkakas Bengkel Service | 40 | 271.933.000,00 | |
| 2.1.4 | Perkakas Bengkel Kayu | 6 | 8.040.000,00 | |
| 2.1.5 | Peralatan Las | 25 | 78.974.875,00 | |
| 2.1.6 | Perkakas Pabrik Es | 35 | 483.221.000,00 | |
| 2.2 | Alat Bengkel Tak Bermesin | | 56.747.000,00 | |
| 2.2.1 | PeralatanTukang Besi | 31 | 56.747.000,00 | |
| 3 | Alat Pertanian | | 1.389.000,00 | |
| 3.1 | Alat Pengolahan | | 1.389.000,00 | |
| 3.1.1 | Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak | 1 | 1.389.000,00 | |
| 4 | Alat Kantor dan RumahTangga | | 1.639.426.813,00 | |
| 4.1 | Alat Kantor | | 497.262.549,00 | |
| 4.1.1 | Mesin Ketik | 3 | 7.448.106,00 | |
| 4.1.2 | Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 116 | 437.954.843,00 | |
| 4.1.3 | Alat Kantor Lainnya | 10 | 51.859.600,00 | |
| 4.2 | Alat RumahTangga | | 946.350.449,00 | |

| No | Nama Barang / Jenis Barang | Jumlah Barang Unit/Buah | Harga | Ket |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----|
| 4.2.1 | Mebel | 242 | 563.653.666,00 | |
| 4.2.2 | Alat Pengukur Waktu | 1 | 1.632.100,00 | |
| 4.2.3 | Alat Pembersih | 1 | 2.163.000,00 | |
| 4.2.4 | Alat Pendingin | 36 | 180.167.583,00 | |
| 4.2.5 | Alat Dapur | 44 | 44.055.000,00 | |
| 4.2.6 | Alat RumahTangga Lainnya (Home Use) | 48 | 130.879.100,00 | |
| 4.2.7 | Alat Pemadam Kebakaran | 22 | 23.800.000,00 | |
| 4.3 | Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | | 195.813.815,00 | |
| 4.3.1 | Meja Kerja Pejabat | 36 | 102.157.315,00 | |
| 4.3.2 | Meja Rapat Pejabat | 1 | 7.662.200,00 | |
| 4.3.3 | Kursi Kerja Pejabat | 45 | 74.981.500,00 | |
| 4.3.4 | Kursi Rapat Pejabat | 1 | 3.012.800,00 | |
| 4.3.1 | Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat | 1 | 8.000.000,00 | |
| 5 | Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | | 266.520.452,00 | |
| 5.1 | Alat Studio | | 258.246.582,00 | |
| 5.1.1 | Peralatan Studio Audio | 82 | 244.488.500,00 | |
| 5.1.2 | Peralatan Studio Video dan Film | 4 | 13.758.352,00 | |
| 5.2 | Alat Komunikasi | | 8.273.600,00 | |
| 5.2.1 | Alat Komunikasi Telephone | 2 | 8.273.600,00 | |
| 5.3 | Alat Kedokteran dan Kesehatan | | 7.977.500,00 | |
| 5.3.1 | Alat Kedokteran | | 7.977.500,00 | |
| 5.3.1.1 | Alat Kedokteran Umum | 3 | 7.977.500,00 | |
| 6 | Komputer | | 941.893.033,00 | |
| 6.1 | Komputer Unit | | 694.315.800,00 | |
| 6.1.1 | Komputer Jaringan | 7 | 79.711.000,00 | |
| 6.1.2 | Personal Computer | 61 | 614.604.800,00 | |
| 6.2 | Peralatan Komputer | | 247.577.233,00 | |
| 6.2.1 | Peralatan Mainframe | 1 | 1.777.000,00 | |
| 6.2.2 | Peralatan Mini Computer | 7 | 23.886.950,00 | |
| 6.2.3 | Peralatan Personal Computer | 43 | 167.463.283,00 | |
| 6.2.4 | Peralatan Jaringan | 2 | 54.450.000,00 | |
| Jumlah | | | <u>16.933.172.364,00</u> | |

3. Pembiayaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan berdasarkan perincian pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Rincian Anggaran Belanja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

| NO. | U R A I A N | JUMLAH | REALISASI |
|-----|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I | Pendapatan Daerah | Rp 900.000.000,- | Rp 1.184.659.600,- |
| II | Belanja Operasi | Rp 11.182.579.165,- | Rp 11.088.402.454,- |
| | a. Belanja Pegawai | Rp 4.679.621.620,- | Rp 4.650.989.500,- |
| | b. Belanja Barang dan Jasa | Rp 6.502.957.345,- | Rp 6.437.412.954,- |
| | c. Belanja Hibah | Rp 0,- | Rp 0,- |
| | Belanja Modal | Rp 16.572.800,- | Rp 16.007.000,- |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp 16.572.800,- | Rp 16.007.000,- |
| | Total Belanja | Rp 11.199.151.965,- | Rp 11.104.409.454,- |

D. Sistematika Penyajian LKjIP

Sistematika pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu pada format yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 yang merupakan perbaikan dari keputusan yang sama Nomor 589/IX/6/Y/99 yang terakhir diperbarui dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara atau PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014.

Secara umum penyusunan Laporan Kinerja mengikuti prinsip-prinsip kejujuran, obyektif, akurat dan transparan. Format Laporan Kinerja terdiri dari :

Ikhtisar Eksekutif

Dalam bagian ini secara umum disajikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sejauhmana Dinas telah mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta permasalahan dan solusinya. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis sebagai berikut :

- A. Capaian Kinerja Organisasi;
- B. Perbandingan Realisasi Kinerja;
- C. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Renstra;
- D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional;
- E. Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan;
- F. Permasalahan dan Solusi;
- G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya;
- H. Analisa Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran

- a. Matriks Renstra Strategis
- b. Pengukuran Kinerja Tahun 2025
- c. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
- d. Lampiran lainnya (inovasi, penghargaan dll.)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi aspirasi stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis organisasi.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Tantangan (Threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan mempunyai rencana strategis tahun 2025-2029 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala/hambatan yang kemungkinan timbul. Rencana strategis tahun 2025-2029 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam bab ini.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan adalah sebagai berikut :

a. Visi

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, Visi Pembangunan Kabupaten Lamongan adalah

“Kejayaan Lamongan Yang Berkelanjutan”

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **Kejayaan**, diartikan sebagai kondisi daerah yang mampu bersaing secara regional maupun nasional, ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter. Selain itu, pengelolaan potensi sumber daya alam dan pelestarian budaya lokal juga menjadi kekuatan pendorong dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
2. **Berkelanjutan**, diartikan sebagai kesinambungan pembangunan yang adil dan merata, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup serta harmoni sosial. Kabupaten Lamongan berkomitmen membangun sistem pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, solidaritas, dan toleransi, sehingga masyarakat yang majemuk dapat hidup berdampingan secara damai.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan
- Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berahklak dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman
- Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan
- Misi 4 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ditengah Kehidupan Masyarakat yang Religius, Harmoni, Berbudaya dan Partisipatif Dalam Pembangunan
- Misi 5 : Mewujudkan Reformasi Birokasi yang Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif

1. Tujuan

Berdasarkan visi, misi dan faktor–faktor kunci keberhasilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan dan indikator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Dalam rangka mewujudkan visi Tahun 2025-2029, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan masuk ke misi 1 (satu) yaitu :

“Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan”

Pada misi 1 (satu) mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pembangunan ekonomi Lamongan yang diarahkan tidak hanya tumbuh secara akseleratif, tetapi juga inklusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan, dapat merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi yang dilakukan.

Berdasarkan misi tersebut, tujuan pembangunan yang hendak dicapai melalui Renstra Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yaitu :

“Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat”

Tujuan tersebut direpresentasikan sebagai penjabaran dari misi kepala daerah yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja yang memberikan arah pembangunan dan juga menjadi arah strategis yang akan diwujudkan melalui berbagai sasaran, program, dan kegiatan yang terukur, sehingga kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Lamongan dapat terlaksana secara optimal.

Tabel 2.1
Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan

| Tujuan | Indikator |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat | Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) |

Sumber data : Renstra Disnaker Tahun 2025-2029

Sedangkan indikator tujuan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan

| Tujuan | Indikator Tujuan | Perhitungan |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persentase Penurunan TPT | $\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$ |

Sumber data : Renstra Disnaker Tahun 2021-2026

2. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang lebih terukur dan spesifik, mudah dicapai, rasional, serta digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan perangkat daerah untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Dari tujuan diatas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan mempunyai 2 (dua) sasaran yang merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategis. Sasaran-sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dan indikatornya sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan

| Sasaran | Indikator Sasaran | Perhitungan |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja | Persentase Penduduk yang Bekerja | $\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$ |
| | | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik | Nilai SAKIP | Penilaian Inspektorat terhadap penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah |
| | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) mengacu pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 |
| | Nilai Manajemen Risiko | Penilaian Inspektorat terhadap penyelenggaraan Manajemen Risiko Perangkat Daerah |

Sumber data : Renstra Disnaker Tahun 2025-2029

Sedangkan sasaran dan indikator sasaran dari Dinas Pemberdayaan Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan

| Sasaran | Indikator Sasaran | Perhitungan |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya Penduduk yang Bekerja | Persentase Penduduk yang Bekerja | $\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$ |
| Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP DISNAKER | Penilaian dari INSPEKTORAT |

Sumber data : Renstra Disnaker Tahun 2021-2026

B. Rencana Kinerja Tahun 2025 Program dan Kegiatan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan memuat rencana capaian kinerja dari Renstra yang bersifat tahunan yaitu target-target kinerja output dari setiap kegiatan, target outcome dari setiap sasaran dalam mendukung tujuan. Di dalam Rencana Kinerja Tahunan tahun 2025, indikator kinerja yang dikembangkan dan disepakati untuk pengukuran capaian kinerja adalah indikator output dan outcome dan diuraikan berdasarkan kegiatan dan sasaran serta target kuantitatif atau kualitatifnya.

Adapun mengenai rencana kinerja tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan baik berupa program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan sebagai berikut ini :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2025

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Target | Pagu Anggaran (Rp) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah | Nilai IKM Internal Disnaker | 82 | 5.683.107.899 |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah | 22 dokumen | 28.571.500 |
| • Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 dokumen | 6.420.000 |

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Target | Pagu Anggaran (Rp) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| • Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 4 Laporan | 7.823.900 |
| • Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 14.327.600 |
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Daerah | 100% | 4.699.621.820 |
| • Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 orang | 4.679.621.820 |
| • Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 laporan | 10.000.000 |
| • Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 3 laporan | 10.000.000 |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 25.426.600 |
| • Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | 25 orang | 25.426.600 |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum perangkat daerah | 100% | 64.350.200 |
| • Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 17 paket | 13.426.200 |

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Target | Pagu Anggaran (Rp) |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| • Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 25 paket | 15.284.000 |
| • Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan | 5 paket | 4.505.000 |
| • Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 2 dokumen | 15.000.000 |
| • Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 20 laporan | 16.135.000 |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 12.443.600 |
| • Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | 2 unit | 4.329.200 |
| • Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 3 unit | 8.114.400 |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 766.880.279 |
| • Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 3 laporan | 282.129.467 |
| • Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 60 laporan | 22.058.600 |
| • Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 14 laporan | 462.692.212 |

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Target | Pagu Anggaran (Rp) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 85.813.900 |
| • Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 2 unit | 54.190.700 |
| • Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya | 14 unit | 6.623.200 |
| • Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | 25.000.000 |
| Program Perencanaan Tenaga Kerja | Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja | 88,89% | 7.380.500 |
| Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Jumlah dokumen evaluasi Rencana Tenaga Kerja (RTK) | 1 Dokumen | 7.380.500 |
| • Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Jumlah SDM perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro | 25 orang | 7.380.500 |
| Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | 1,38% | 1.291.738.700 |
| | Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja | 46,96% | |
| Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah lulusan pelatihan yang bersertifikat kompetensi | 224 orang | 1.256.691.400 |
| • Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis | 160 orang | 1.250.000.000 |

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Target | Pagu Anggaran (Rp) |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | kompetensi pada tahun n | | |
| • Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja | 2 unit | 6.691.400 |
| Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang terakreditasi | 45 LPK | 8.030.300 |
| • Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina | 31 Lembaga | 8.030.300 |
| Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | Jumlah produktivitas SDM perusahaan yang meningkat | 10 orang | 11.883.000 |
| • Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas | 10 Perusahaan | 11.883.000 |
| Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas | 7 perusahaan kecil | 15.134.000 |
| • Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | 1 Dokumen | 15.134.000 |
| Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota | 75,05% | 217.992.200 |
| Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pelayanan antar kerja | 2 pelayanan | 35.440.200 |

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Target | Pagu Anggaran (Rp) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| • Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL | 75 Orang | 16.768.000 |
| • Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD | 15 Orang | 7.197.500 |
| • Sub Kegiatan Perluasan kesempatan kerja | Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja | 20 orang | 11.474.700 |
| Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja | 1.000 pencari | 117.754.800 |
| • Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar kerja online | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | 1 Dokumen | 50.000.000 |
| • Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | 25 orang | 17.754.800 |
| • Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja | 1.000 orang | 50.000.000 |
| Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah CPMI dan PMI Purna yang dilindungi | 110 orang | 64.797.200 |
| • Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya | 20 orang | 17.026.900 |
| • Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon | Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan | 20 Orang | 22.842.000 |

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Target | Pagu Anggaran (Rp) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Pekerja Migran | PMI Bermasalah yang ditangani | | |
| • Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | Jumlah PMI purna yang diberdayakan | 20 Orang | 24.928.300 |
| Program Hubungan Industrial | Persentase perusahaan yang menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan | 60,10% | 3.973.901.766 |
| Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perusahaan yang menerapkan UU bidang ketenagakerjaan | 30 perusahaan | 3.930.666.566 |
| • Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB), Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan | 1 Laporan | 3.930.666.566 |
| Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian perselisihan kerja | 10 Perselisihan Kerja | 43.235.200 |
| • Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LKS Tripartit yang dibina | 1 Lembaga | 43.235.200 |
| Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya | 64,75% | 25.030.900 |
| Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 | Jumlah calon transmigran yang ditempatkan | 10 KK | 25.030.900 |

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Target | Pagu Anggaran (Rp) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| • Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan | 5 KK | 18.807.800 |
| • Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi | Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan | 20 KK | 6.223.100 |

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud yang nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi guna menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan sanksi. Perjanjian kinerja dilakukan secara berjenjang pada jajaran struktural maupun fungsional dan pelaksana melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2025 disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Berikut ini tabel Perjanjian Kinerja mulai Kepala Dinas Tenaga Kerja sampai dengan Kasubbag. pada Tahun 2025 :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Meningkatnya Penduduk yang Bekerja | Persentase Penduduk yang Bekerja | 95,77% |
| Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP DISNAKER | 87,30 |

Sumber data : Perjanjian Kinerja Disnaker sesuai Renstra Disnaker Tahun 2021-2026

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, maka Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2025 dilakukan perubahan dengan mengacu renstra terbaru, sehingga Perjanjian Kinerja Dinas berubah menjadi sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja | Persentase Penduduk yang Bekerja | 95,77% |
| Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | 87,38 |
| | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | 87,64 |
| | Nilai Manajemen Risiko | 85,85 |

Sumber data : Perjanjian Kinerja Disnaker sesuai Renstra Disnaker Tahun 2025-2029

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari RPJPD, RPJMD, Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan. Akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan tahun 2025 merupakan hasil pencapaian kinerja yang ditargetkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 dan telah diperjanjikan secara berjenjang oleh suruh pegawai.

Pencapaian tujuan dan sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja. Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dari setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasi yang dicapai oleh indikator kinerja tersebut, sehingga diketahui selisih kinerjanya (performance gap). Berdasarkan performance gap tersebut, dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Dalam proses pengukuran kinerja tersebut, diperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

1. Pencapaian Kinerja Tujuan

Kinerja tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2025 sebanyak 1 (satu) indikator yang telah ditetapkan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tujuan
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2025

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Tahun 2025 | | | Ket. |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------|------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | |
| 1 | Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja | Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 4,28 | $\frac{35.733}{833.612} \times 100$ 4,29 | 99,77% | |

- Indikator Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan sebesar 4,28 terealisasi sebesar 4,29% sehingga tercapai sebesar 99,77%.

(Catatan: Untuk TPT, semakin kecil angka realisasi dibandingkan target yang lebih tinggi, kinerjanya dianggap semakin baik/menurunkan angka pengangguran).

2. Pencapaian Kinerja Sasaran

Kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2025 sebanyak 4 (empat) indikator yang telah ditetapkan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2025

| No. | Sasaran | Indikator Sasaran | Tahun 2025 | | | Ket. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------|------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | |
| 1 | Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja | Persentase Penduduk yang Bekerja | 95,77% | $\frac{797.879}{833.612} \times 100$ 95,71% | 99,94% | |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik | Nilai SAKIP | 87,38 | Belum Rilis | | |
| | | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | 87,64 | 87,65 | 100,01% | |
| | | Nilai Manajemen Risiko | 85,85 | Belum Rilis | | |

- Indikator Persentase Penduduk yang Bekerja ditargetkan sebesar 95,77% realisasi sebesar 95,71% sehingga tercapai sebesar 99,94%.

- Indikator Nilai SAKIP realisasi tahun 2025 belum rilis, masih menunggu hasil penilaian dari Inspektorat Kabupaten Lamongan.
- Indikator Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ditargetkan sebesar 87,64 realisasi sebesar 87,65% sehingga tercapai sebesar 100,01%.
- Indikator Nilai Manajemen Risiko realisasi tahun 2025 belum rilis, masih menunggu hasil penilaian dari Inspektorat Kabupaten Lamongan.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

1. Realisasi Kinerja Tujuan

Kinerja tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2025 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja Tujuan
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2025

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Realisasi | |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|
| | | | 2024 | 2025 |
| 1 | Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja | Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 4,34 | 4,29 |

- Indikator Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) realisasi tahun 2025 sebesar 4,29% menurun 0,05 persen dibandingkan dengan tahun 2024.

2. Realisasi Kinerja Sasaran

Kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2025 tahun 2025 sebanyak 4 (empat) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Sasaran
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2025

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Realisasi | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------|
| | | | 2024 | 2025 |
| 1 | Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja | Persentase Penduduk yang Bekerja | 95,66% | 95,71% |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik | Nilai SAKIP | 86,90 | Belum Rilis |
| | | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | 87,63 | 87,65 |
| | | Nilai Manajemen Risiko | 85,82 | Belum Rilis |

- Indikator Persentase Penduduk yang Bekerja realisasi tahun 2025 sebesar 95,71% mengalami kenaikan sebesar 0,05 persen dibandingkan dengan tahun 2024.
- Indikator Nilai SAKIP realisasi tahun 2025 belum rilis, sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun 2024. Nilai SAKIP tahun 2025 masih menunggu hasil penilaian dari Inspektorat Kabupaten Lamongan.
- Indikator Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) realisasi tahun 2025 sebesar 87,65% mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen dibandingkan dengan tahun 2024.
- Indikator Nilai Manajemen Risiko realisasi tahun 2025 belum rilis, sehingga belum bisa dibandingkan. Nilai Manajemen Risiko tahun 2025 masih menunggu hasil penilaian dari Inspektorat Kabupaten Lamongan.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D AKHIR PERIODE RENSTRA

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan

Realisasi Kinerja Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan tahun 2025 belum mendekati target akhir periode Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, sebagaimana yang tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan
Tahun 2025 dengan Akhir Periode Renstra

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Realisasi 2025 | Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2029) |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 1 | Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja | Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 4,29% | 4,01% |

- Indikator Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) realisasi tahun 2025 sebesar 4,29% belum mendekati target akhir periode Renstra Dinas. Target akhir periode sebesar 4,01% sudah terealisasi 4,29% atau 93,47 persen.

(Catatan: Untuk TPT, semakin kecil angka realisasi dibandingkan target yang lebih tinggi, kerjanya dianggap semakin baik/menurunkan angka pengangguran).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran

Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan tahun 2025 telah mendekati target akhir periode Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, sebagaimana yang tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan
Tahun 2025 dengan Akhir Periode Renstra

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Realisasi 2025 | Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2029) |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 1 | Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja | Persentase Penduduk yang Bekerja | 95,71% | 95,99% |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik | Nilai SAKIP | Belum Rilis | 88,55 |
| | | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | 87,65 | 87,85 |
| | | Nilai Manajemen Risiko | Belum Rilis | 86,00 |

- Indikator Persentase Penduduk yang Bekerja realisasi tahun 2025 sebesar 95,71% telah mendekati target akhir periode Renstra Dinas. Target akhir periode sebesar 95,99% sudah terealisasi 95,71% atau 99,71 persen.
- Indikator Nilai SAKIP realisasi tahun 2025 sebesar belum rilis, sehingga belum diketahui telah mendekati/melampaui target akhir periode Renstra Dinas. Target akhir periode sebesar 88,55.
- Indikator Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) realisasi tahun 2025 sebesar 87,65 telah mendekati target akhir periode Renstra Dinas. Target akhir periode sebesar 87,85 sudah terealisasi 87,65 atau 99,77 persen.
- Indikator Nilai Manajemen Risiko realisasi tahun 2025 sebesar belum rilis, sehingga belum diketahui telah mendekati/melampaui target akhir periode Renstra Dinas. Target akhir periode sebesar 86,00.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan

Realisasi Kinerja Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan tahun 2025 belum melampaui realisasi nasional, sebagaimana yang tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan dengan Realisasi Nasional

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Realisasi 2025 | Realisasi Nasional |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja | Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 4,29% | 4,85% |

- Indikator Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) realisasi tahun 2025 sebesar 4,29% belum melampaui realisasi nasional.

(Catatan: Untuk TPT, semakin kecil angka realisasi dibandingkan target yang lebih tinggi, kinerjanya dianggap semakin baik/menurunkan angka pengangguran).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran

Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan tahun 2025 telah melampaui realisasi nasional, sebagaimana yang tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran dengan Realisasi Nasional

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Realisasi 2025 | Realisasi Nasional |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja | Persentase Penduduk yang Bekerja | 95,71% | 95,16% |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik | Nilai SAKIP | Belum Rilis | - |
| | | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | 87,65 | - |
| | | Nilai Manajemen Risiko | Belum Rilis | - |

- Indikator Persentase Penduduk yang Bekerja realisasi tahun 2025 sebesar 95,71% telah telah melampaui realisasi nasional.
- Indikator Nilai SAKIP realisasi tahun 2025 sebesar belum rilis. Nilai rata-rata SAKIP nasional secara keseluruhan untuk tahun evaluasi 2025 belum dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian PANRB.
- Indikator Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) realisasi tahun 2025 sebesar 87,65. Data resmi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nasional untuk Disnaker Jatim tahun 2025 belum dirilis.
- Indikator Nilai Manajemen Risiko realisasi tahun 2025 sebesar belum rilis. Sedangkan nilai realisasi nasional tidak tersedia.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN YANG TELAH DILAKUKAN

Realisasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam indikator sasaran program kerja. Adapun faktor yang mendukung secara umum keberhasilan realisasi kinerja antara lain :

1. Meningkatnya kompetensi ASN;
2. Penjurangan kinerja yang jelas dengan didukung komitmen untuk mengimplementasikan perjanjian kinerja;
3. Perencanaan kinerja berbasis data capaian tahun sebelumnya;
4. Evaluasi secara berkala secara berjenjang baik oleh pejabat yang berwenang maupun oleh ketua tim kerja;
5. Adanya kolaborasi dengan perangkat daerah terkait, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Transmigrasi serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal.
6. Tersedianya jumlah aparatur yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan program kerja;
7. Adanya struktur organisasi perangkat daerah dan pembagian tugas dari masing - masing bidang yang jelas;
8. Adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin baik diantara masing - masing bidang;
9. Program kerja berpedoman pada Tupoksi yang jelas, SOP dan SPM serta petunjuk operasional yang dapat dipahami segenap aparatur.

Secara khusus faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja pada tahun 2025 berdasarkan indikator tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Indikator Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 dipengaruhi oleh adanya pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, dan program padat karya melalui BLK (Balai Latihan Kerja), kombinasi antara kebijakan Pemkab Lamongan, kinerja sektor ekonomi utama, dan iklim investasi.
2. Pencapaian Indikator Persentase Penduduk yang Bekerja Keberhasilan indikator ini dikarenakan penduduk yang bekerja dan angkatan kerja mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari jumlah penduduk yang bekerja dari 792.295 ribu orang pada tahun 2024 menjadi 797.879 ribu orang pada tahun 2025. Sedangkan jumlah

angkatan kerja yang mengalami kenaikan dari 828.276 ribu orang pada tahun 2024 menjadi 833.612 ribu orang pada tahun 2025.

3. Pencapaian Indikator Nilai SAKIP tahun 2025 dipengaruhi oleh kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan realisasi anggaran, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, pemanfaatan teknologi informasi (e-SAKIP), peningkatan kapasitas SDM serta peran dan komitmen dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
4. Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 dipengaruhi oleh adanya peningkatan kompetensi pelaksana serta sarana dan prasarana dalam pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan.
5. Pencapaian Indikator Nilai manajemen risiko tahun 2025 dipengaruhi oleh adanya komitmen dan Kepemimpinan Manajemen, Integrasi dengan Tujuan Organisasi, Integrasi dengan Manajemen Kinerja, Efektivitas Identifikasi dan Mitigasi Risiko, Kondisi Eksternal dan Lingkungan, serta Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan.

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan tahun 2025 dalam Urusan Ketenagakerjaan sebagai berikut :

- a) Ketidaksesuaian (*mismatch*) antara keahlian lulusan dengan kebutuhan industri;
- b) Belum sinkronisasi antara kebutuhan dunia kerja dan program pelatihan;
- c) Informasi lowongan kerja yang belum sepenuhnya terintegrasi;
- d) Belum optimalnya penempatan kerja;
- e) Masih adanya perselisihan hubungan industrial (PHI).

2. Solusi

Solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas antara lain :

- a) Melakukan kolaborasi yang lebih erat antara dunia pendidikan dan dunia industri (*link and match*);
- b) Melakukan sinkronisasi antara program pelatihan kerja dengan permintaan pasar kerja;
- c) Pemanfaatan aplikasi layanan antar kerja online;
- d) Penguatan BKK (Bursa Kerja Khusus) baik itu di sekolah/universitas;

- e) Penguatan peran mediator hubungan industrial serta forum komunikasi tripartit di daerah.

G. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

Pelaksanaan program kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan disusun dan dituangkan dalam perencanaan strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang penjabaran operasional rencana tahunannya yang tertuang dalam dokumen Renja dengan berpedoman RPJMD Kabupaten Lamongan dan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Lamongan Tahun 2021-2026. Pada penyusunannya juga memperhatikan tantangan dan potensi yang ada di wilayah. Sehubungan dengan hal dimaksud dalam penyusunan rencana kegiatan didasarkan memfokuskan terhadap tantangan yang dihadapi dan mengoptimalkan potensi di wilayah.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan adalah unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Melakukan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada dengan mengoptimalkan efektifitas koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder yang ada di Kabupaten dalam mendukung setiap program pembangunan di wilayah Kabupaten yang diarahkan dalam pencapaian visi dan misi.

**Tabel 3.9 Analisis Efisiensi Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan
Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi**

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Efektif | Efisien | KETERANGAN ≤ 90% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|----------------------|----------------------|-----------|---------|---------|---------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | | | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai IKM Internal Disnaker | 82 | 87,65 | 107 | 5.683.107.899 | 5.625.975.457 | 99 | √ | √ | |
| Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah | 22 dokumen | 22 dokumen | 100 | 28.571.500 | 28.571.500 | 100 | √ | √ | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 | 6.420.000 | 6.420.000 | 100 | √ | √ | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 | 7.823.900 | 7.823.900 | 100 | √ | √ | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 | 14.327.600 | 14.327.600 | 100 | √ | √ | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Daerah | 100 | 100 | 100 | 4.699.621.820 | 4.670.989.500 | 99 | √ | √ | |

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Efektif | Efesien | KETERANGAN ≤ 90% |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|---------|---------|---------|---------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | | | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 orang | 30 orang | 100 | 4.679.621.820 | 4.650.989.500 | 99 | √ | √ | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 laporan | 3 laporan | 100 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 | √ | √ | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 3 laporan | 3 laporan | 100 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 | √ | √ | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | 25.426.600 | 25.345.000 | 100 | √ | √ | |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | 25 orang | 25 orang | 100 | 25.426.600 | 25.345.000 | 100 | √ | √ | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum perangkat daerah | 100 | 100 | 100 | 64.350.200 | 58.237.000 | 91 | √ | √ | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 17 paket | 17 paket | 100 | 13.426.200 | 13.383.300 | 100 | √ | √ | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 25 paket | 25 paket | 100 | 15.284.000 | 15.283.800 | 100 | √ | √ | |

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Efektif | Efesien | KETERANGAN ≤ 90% |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | | | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 5 paket | 5 paket | 100 | 4.505.000 | 4.494.900 | 100 | √ | √ | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 | 15.000.000 | 8.940.000 | 60 | √ | √ | Tidak terserap karena Realisasi berdasarkan kebutuhan karena pembayaran tagihan koran sesuai yang ada |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 20 laporan | 13 laporan | 65 | 16.135.000 | 16.135.000 | 100 | √ | √ | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 | 100 | 100 | 12.443.600 | 11.877.000 | 95 | √ | √ | |
| Pengadaan Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | 2 unit | 2 unit | 100 | 4.329.200 | 3.885.000 | 90 | √ | √ | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 3 unit | 3 unit | 100 | 8.114.400 | 7.992.000 | 98 | √ | √ | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah | 100 | 100 | 100 | 766.880.279 | 747.176.557 | 97 | √ | √ | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber | 3 laporan | 3 laporan | 100 | 282.129.467 | 266.175.057 | 94 | √ | √ | |

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Efektif | Efesien | KETERANGAN ≤ 90% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | | | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 |
| Daya Air dan Listrik | daya air dan listrik yang disediakan | | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 60 laporan | 60 laporan | 100 | 22.058.600 | 22.055.000 | 100 | v | v | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 14 laporan | 14 laporan | 100 | 462.692.212 | 458.946.500 | 99 | v | v | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 | 100 | 100 | 85.813.900 | 83.778.900 | 98 | v | v | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 2 unit | 2 unit | 100 | 54.190.700 | 53.588.200 | 99 | v | v | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya | 14 unit | 6 unit | 43 | 6.623.200 | 6.159.200 | 93 | v | v | |

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Efektif | Efesien | KETERANGAN ≤ 90% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|---------|---------|---------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | | | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | 1 unit | 100 | 25.000.000 | 24.031.500 | 96 | √ | √ | |
| Program Perencanaan Tenaga Kerja | Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja | 88,89% | 96,12% | 108 | 7.380.500 | 7.380.500 | 100 | √ | √ | |
| Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Jumlah dokumen evaluasi Rencana Tenaga Kerja (RTK) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 7.380.500 | 7.380.500 | 100 | √ | √ | |
| Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Jumlah SDM perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro | 25 orang | 25 orang | 100 | 7.380.500 | 7.380.500 | 100 | √ | √ | |
| Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | 1,38 | 3,31 | 240 | 1.291.738.700 | 1.268.616.002 | 98 | √ | √ | |
| | Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja | 46,96 | belum rilis | - | | - | | | | |
| Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah lulusan pelatihan yang bersertifikat kompetensi | 224 orang | 185 orang | 83 | 1.256.691.400 | 1.233.755.702 | 98 | √ | √ | |
| Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n | 160 orang | 185 orang | 116 | 1.250.000.000 | 1.227.163.502 | 98 | √ | √ | |

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Efektif | Efesien | KETERANGAN ≤ 90% |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|----------|----------|---------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | | | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 |
| Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja | 2 unit | 2 unit | 100 | 6.691.400 | 6.592.200 | 99 | √ | √ | |
| Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang terakreditasi | 45 LPK | 2 LPK | 4 | 8.030.300 | 8.030.300 | 100 | √ | √ | |
| Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina | 31 Lembaga | 31 Lembaga | 100 | 8.030.300 | 8.030.300 | 100 | √ | √ | |
| Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | Jumlah produktivitas SDM perusahaan yang meningkat | 10 orang | 10 orang | 100 | 11.883.000 | 11.722.000 | 99 | √ | √ | |
| Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas | 10 Perusahaan | 10 Perusahaan | 100 | 11.883.000 | 11.722.000 | 99 | √ | √ | |
| Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas | 7 perusahaan kecil | 7 perusahaan kecil | 100 | 15.134.000 | 15.108.000 | 100 | √ | √ | |
| Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 15.134.000 | 15.108.000 | 100 | √ | √ | |
| Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota | 75,05 | 76,04 | 101 | 217.992.200 | 212.977.895 | 98 | √ | √ | |

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Efektif | Efesien | KETERANGAN ≤ 90% |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | | | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 |
| Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pelayanan antar kerja | 2 pelayanan | 2 pelayanan | 100 | 35.440.200 | 35.440.200 | 100 | √ | √ | |
| Pelayanan antar Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL | 75 Orang | 1.945 Orang | 12.967 | 16.768.000 | 16.768.000 | 100 | √ | √ | |
| Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD | 15 Orang | 45 Orang | 300 | 7.197.500 | 7.197.500 | 100 | √ | √ | |
| Perluasan kesempatan kerja | Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja | 20 orang | 20 orang | 100 | 11.474.700 | 11.474.700 | 100 | √ | √ | |
| Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja | 1.000 pencaker | 2.558 pencaker | 256 | 117.754.800 | 116.015.500 | 99 | √ | √ | |
| Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar kerja online | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 50.000.000 | 49.395.000 | 99 | √ | √ | |
| Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | 25 orang | 25 orang | 100 | 17.754.800 | 17.715.500 | 100 | √ | √ | |
| Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja | 1.000 orang | 2.223 orang | 222 | 50.000.000 | 48.905.000 | 98 | √ | √ | |

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Efektif | Efesien | KETERANGAN ≤ 90% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|----------------------|------------|----------|----------|---------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | | | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 |
| Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah CPMI dan PMI Purna yang dilindungi | 110 orang | 342 Orang | 32 | 64.797.200 | 61.522.195 | 95 | √ | √ | |
| Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya | 20 orang | 25 orang | 125 | 17.026.900 | 16.136.900 | 95 | √ | √ | |
| Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang ditangani | 20 Orang | 297 Orang | 1.485 | 22.842.000 | 21.856.995 | 96 | √ | √ | |
| Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | Jumlah PMI purna yang diberdayakan | 20 Orang | 20 Orang | 100 | 24.928.300 | 23.528.300 | 94 | √ | √ | |
| Program Hubungan Industrial | Persentase perusahaan yang menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan | 60,10 | 67,36 | 112 | 3.973.901.766 | 3.964.428.700 | 100 | √ | √ | |

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Efektif | Efesien | KETERANGAN ≤ 90% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|---------------|---------|---------|---------|---------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | | | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 |
| Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perusahaan yang menerapkan UU bidang ketenagakerjaan | 30 perusahaan | 30 perusahaan | 100 | 3.930.666.566 | 3.921.244.500 | 100 | v | v | |
| Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB), Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 3.930.666.566 | 3.921.244.500 | 100 | v | v | |
| Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian perselisihan kerja | 10 Perselisihan Kerja | 5 Perselisihan Kerja | 100 | 43.235.200 | 43.184.200 | 100 | v | v | |
| Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LKS Tripartit yang dibina | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 100 | 43.235.200 | 43.184.200 | 100 | v | v | |

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Efektif | Efesien | KETERANGAN ≤ 90% |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------------|------------|---------|---------|---------|---------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | | | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 |
| Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya | 64,75% | 67,69% | 105 | 25.030.900 | 25.030.900 | 100 | √ | √ | |
| Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah calon transmigran yang ditempatkan | 10 KK | 1 KK | 10 | 25.030.900 | 25.030.900 | 100 | √ | √ | |
| Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan | 5 KK | 1 KK | 20 | 18.807.800 | 18.807.800 | 100 | √ | √ | |
| Penyuluhan Transmigrasi | Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan | 20 KK | 20 KK | 100 | 6.223.100 | 6.223.100 | 100 | √ | √ | |

H. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN PENCAPAIAN KINERJA

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan penunjang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini berkaitan langsung dengan keberhasilan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).

3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini berkaitan langsung dengan keberhasilan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;
- b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- c. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil;
- d. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini berkaitan langsung dengan keberhasilan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
- c. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Hubungan Industrial

Program ini berkaitan langsung dengan keberhasilan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini berkaitan langsung dengan keberhasilan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah Stakeholders terkait atas capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan. Dengan adanya dokumen LKjIP, setiap pertanggungjawaban kinerja sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan sumber daya maupun kebijakannya dapat diukur indikator keberhasilannya. Secara umum beberapa kinerja ketenagakerjaan Tahun 2025 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meski demikian, perlu adanya intervensi dari faktor-faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi pencapaian target.

Kesimpulan dari capaian kinerja tiap kelompok sasaran secara terinci adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok kinerja tujuan dengan indikator kinerja :
 1. Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), belum memenuhi target yang ditetapkan. Tercatat capaian realisasi kinerja 4,29% dari target 4,28% dan diperoleh capaian kinerja 99,77%. Namun, Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 menurun 0,05 persen dibandingkan dengan tahun 2024.
- b. Kelompok kinerja sasaran dengan indikator kinerja :
 1. Persentase Penduduk yang Bekerja, belum memenuhi target yang ditetapkan. Tercatat capaian realisasi kinerja 95,71% dari target 95,77% dan diperoleh capaian kinerja 99,94%.
 2. Nilai SAKIP ini belum rilis, masih menunggu hasil penilaian dari Inspektorat Kabupaten Lamongan. Sehingga belum diketahui capaian realisasi kerjanya.
 3. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) memenuhi target yang ditetapkan. Tercatat capaian realisasi kinerja 87,65 dari target 87,64 dan diperoleh capaian kinerja 100,01%.
 4. Nilai Manajemen Risiko ini belum rilis, masih menunggu hasil penilaian dari Inspektorat Kabupaten Lamongan. Sehingga belum diketahui capaian realisasi kerjanya.

B. Saran/Rekomendasi

Beberapa saran/rekomendasi yang disampaikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya perhatian dan strategi khusus terhadap capaian kinerja yang belum tercapai. Capaian kinerja yang telah diperoleh dan memenuhi target atau melebihi target perlu dipertahankan dan terus di tingkatkan kinerjanya. Upaya-upaya perbaikan di berbagai bidang perlu dilakukan melalui program-program yang bersifat inovatif atau program terobosan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang lebih cepat dan optimal.
2. Perlunya kepedulian, komitmen dan keterlibatan yang lebih intens dari bidang-bidang teknis, terkait penyediaan data-data yang diperlukan untuk mengukur capaian kinerja dari setiap indikator kinerja.
3. Diperlukannya pemahaman dan penguasaan substansi yang lebih mendalam dari pejabat yang berwenang pada masing-masing bidang tugas, terkait indikator kinerja bidang yang bersangkutan beserta target-target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis. Dengan adanya pemahaman dan penguasaan terhadap indikator kinerja yang harus dicapai, maka akan dapat diidentifikasi dan dipetakan berbagai effort yang bersifat prioritas dalam rangka mendukung pencapaian target-target kinerja sebagaimana yang telah menjadi kontrak kinerja antara pejabat pada bidang yang bersangkutan dengan atasan langsungnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2025 ini kami susun. Diharapkan proses pembangunan di sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, transparan serta mampu mencerminkan dan merepresentasikan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat yang telah memberikan mandat. Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Lamongan, Januari 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN



M. ZAMRONI, S.Sos. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730707 199303 1 010

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

- Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2025;
- Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
- Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- Lampiran lainnya (inovasi, penghargaan dll).

Matrik Rencana Strategis (RS) Dinas Tenaga Kerja

| TUJUAN Meningkatkan Kesempatan Kerja Masyarakat | | | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| INDIKATOR KINERJA TUJUAN | INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN | KONDISI AWAL | KONDISI AKHIR |
| Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persentase Penduduk yang Bekerja | $\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$ | 95,77% | 95,99% |
| | Nilai SAKIP | Penilaian dari Inspektorat | 87,38% | 88,55% |
| | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) mengacu pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 | 87,64% | 87,85% |
| | Nilai Manajemen Risiko | Penilaian dari Inspektorat | 85,85% | 86,00% |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAHUN DASAR 2024 | TARGET KINERJA SASARAN | | | | | KEBIJAKAN | PROGRAM | PENANGGUNG JAWAB |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| Meningkatnya Penduduk yang Bekerja | Persentase Penduduk yang Bekerja | 95,66% | 95,77% | 95,75% | 95,88% | 95,93% | 95,99% | <p>Peningkatan kompetensi tenaga kerja/pencari kerja sesuai kebutuhan pasar kerja dan mendorong sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan daya saing;</p> <p>Peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk menambah jumlah penganggur yang dilatih;</p> <p>Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan dunia pendidikan dan pelatihan;</p> <p>Peningkatan fasilitasi pertemuan pencari kerja dan pengguna tenaga kerja;</p> <p>Pengembangan program perluasan kesempatan kerja melalui penyelenggaraan bursa kerja online dan optimalisasi sistem informasi bursa kerja yang mudah diakses oleh masyarakat;</p> <p>Penguatan peran mediator hubungan industrial serta forum komunikasi tripartit di daerah;</p> <p>Peningkatan Pemahaman Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bagi Perusahaan melalui Sosialisasi;</p> <p>Optimalisasi pola penempatan Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);</p> <p>Pendirian unit layanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Disnaker serta penguatan regulasi dan advokasi PMI;</p> <p>Peningkatan fasilitasi bagi masyarakat minat transmigrasi.</p> | <p>Program Perencanaan Tenaga Kerja</p> <p>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>Program Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>Program Hubungan Industrial</p> <p>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</p> | <p>Sekretariat Bidang Pelatihan Kerja</p> <p>Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja</p> <p>Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja</p> <p>Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</p> |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | 86,90 | 87,38 | 88,40 | 88,45 | 88,50 | 88,55 | Perbaikan dan Peningkatan Manajemen Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintah di lingkungan OPD | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Sekretariat |
| | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | 87,63 | 87,64 | 87,70 | 87,75 | 87,80 | 87,85 | | | |
| | Nilai Manajemen Risiko | 85,82 | 85,85 | 85,90 | 85,93 | 85,96 | 86,00 | | | |

**PENGUKURAN KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025**

| NO | URUSAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | RUMUS FORMULA INDIKATOR | SATUAN | TAHUN DASAR 2024 | TAHUN 2025 | | |
|----|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | REALISASI (%) | TARGET (%) | CAPAIAN (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | KETENAGAKERJAAN | Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Meningkatnya Penduduk yang Bekerja | Persentase Penduduk yang Bekerja | $\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$ | % | 95,66 | $\frac{797.879}{833.612} \times 100 = 95,71$ | 95,77 | 99,94 |
| | | | Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP DISNAKER | Penilaian dari INSPEKTORAT | Nilai | 88,37 | | 87,38 | Belum Rilis |
| | | | | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) mengacu pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 | Nilai | 87,63 | 87,65 | 87,64 | 100,01 |
| | | | | Nilai Manajemen Risiko | Penilaian Inspektorat terhadap penyelenggaraan Manajemen | Nilai | - | | 85,85 | Belum Rilis |

**PENGUKURAN KINERJA PENDUKUNG
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025**

| NO | URUSAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | RUMUS FORMULA INDIKATOR | SATUAN | TAHUN DASAR 2024 | TAHUN 2025 | | |
|----|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------------------------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | REALISASI (%) | TARGET (%) | CAPAIAN (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | KETENAGAKERJAAN DA | Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat | Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja | Persentase kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja | $\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di OPD}} \times 100$ | % | 100 | $\frac{11}{11} \times 100 = 100$ | 100 | 100,00 |
| | | | Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100$ | % | 3,17% | $\frac{900}{27.156} \times 100 = 3,31$ | 3,2 | 103,57 |
| | | | Meningkatnya Persentase Produktivitas Tenaga Kerja | Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja | $\frac{\text{Jumlah PDRB ADHK}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}$ | % | N/A | | 41.237 | Belum Rilis |
| | | | Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten | $\frac{\text{Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100$ | % | 75,15% | $\frac{1.945}{2.558} \times 100 = 76,04$ | 75,05 | 101,31 |
| | | | Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi | Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) | $\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100$ | % | N/A | $\frac{200}{208} \times 100 = 96,15$ | 95,81 | 100,36 |
| | | | Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi | Presentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya | $\frac{\text{Jumlah transmigran yang meningkat taraf ekonomi dan sosialnya pada Tahun N-1}}{\text{Jumlah transmigran yang ditempatkan di daerah tersebut Tahun N-1}} \times 100$ | % | 67,19% | $\frac{44}{65} \times 100 = 67,69$ | 64,75 | 104,54 |



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mokhammad Zamroni, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. H. Yuhronur Efendi, M.B.A., M.EK.

Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

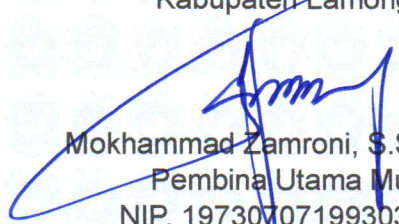
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Lamongan


Dr. H. Yuhronur Efendi, M.B.A., M.EK.

Lamongan, Januari 2025
Pihak Pertama
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Lamongan


Mokhammad Zamroni, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197307071993031010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Penduduk yang Bekerja | Persentase Penduduk yang Bekerja | 95,77% |
| 2 | Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja | 88,37 |

| | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | KET. |
|---|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5.460.967.922,- | APBD |
| 2 | Program Perencanaan Tenaga Kerja | 10.000.000,- | APBD |
| 3 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1.090.000.000,- | DBHCHT dan APBD |
| 4 | Program Penempatan Tenaga Kerja | 245.000.000,- | APBD |
| 5 | Program Hubungan Industrial | 2.871.036.400,- | DBHCHT dan APBD |
| 6 | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | 35.000.000,- | APBD |
| | Jumlah | 9.712.004.322,- | |

Pihak Kedua
Bupati Lamongan

Dr. H. Yuhonur Efendi, M.B.A., M.EK.

Lamongan, Januari 2025
Pihak Pertama
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Lamongan

Mokhammad Zamroni, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197307071993031010



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOKHAMMAD ZAMRONI, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M.B.A., M. EK.**

Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN**

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M.B.A., M. EK.

Lamongan, 23 September 2025

**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN**



MOKHAMMAD ZAMRONI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

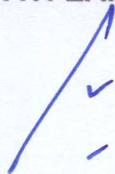
NIP. 19730707 199303 1 010

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja | Persentase penduduk yang bekerja | 95,77% |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | 87,38 |
| | | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | 87,64 |
| | | Nilai Manajemen Risiko | 85,85 |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | KET. |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5.898.724.078,- | APBD |
| 2 | Program Perencanaan Tenaga Kerja | 7.380.500,- | APBD |
| 3 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1.291.738.700,- | DBHCHT dan APBD |
| 4 | Program Penempatan Tenaga Kerja | 217.992.200,- | APBD |
| 5 | Program Hubungan Industrial | 3.973.901.766,- | DBHCHT dan APBD |
| 6 | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | 25.030.900,- | APBD |
| | JUMLAH | 11.414.768.144,- | |

**PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN**



Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M.B.A., M. EK.

Lamongan, 23 September 2025

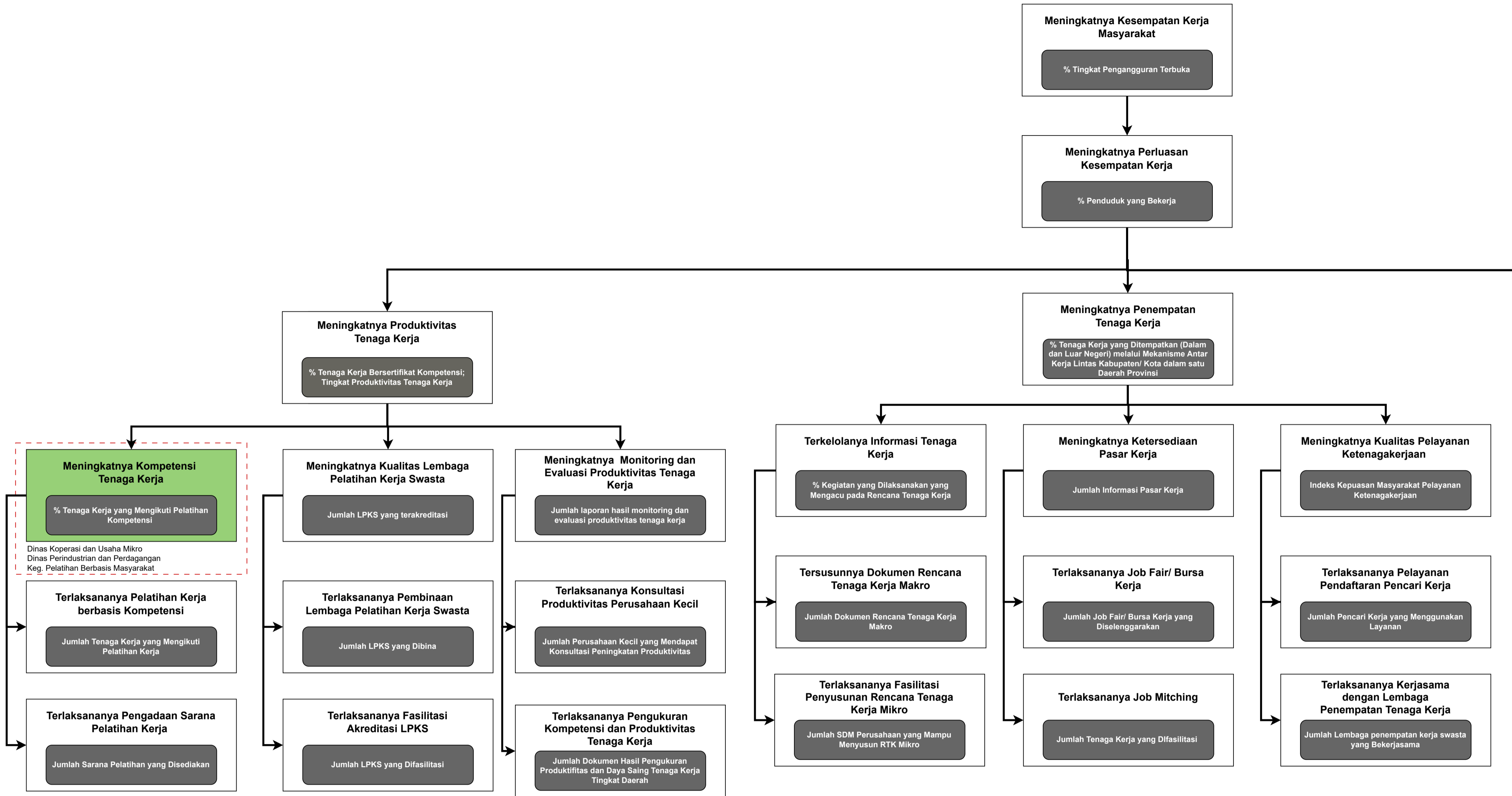
**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN**

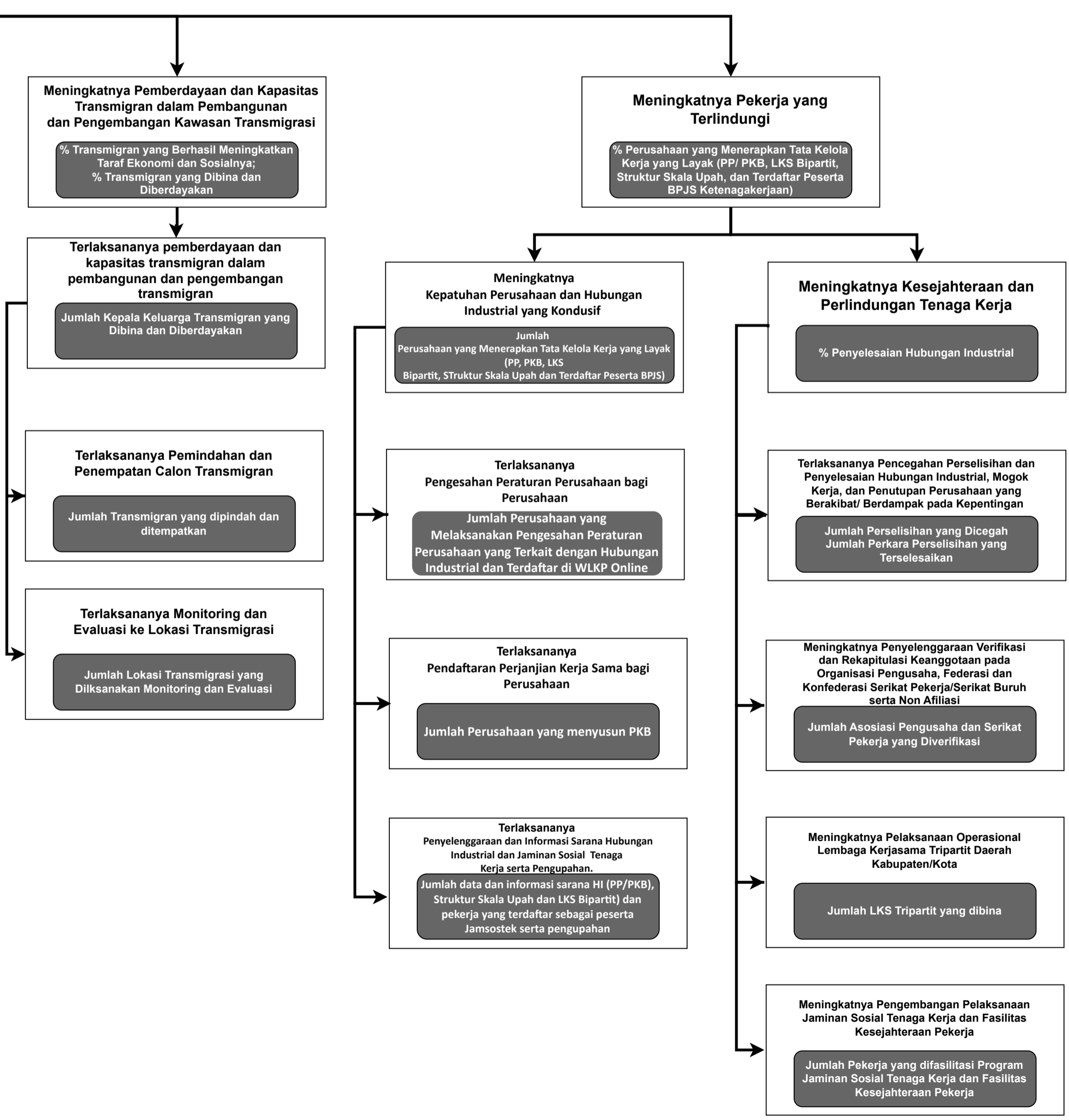


MOKHAMMAD ZAMRONI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730707 199303 1 010





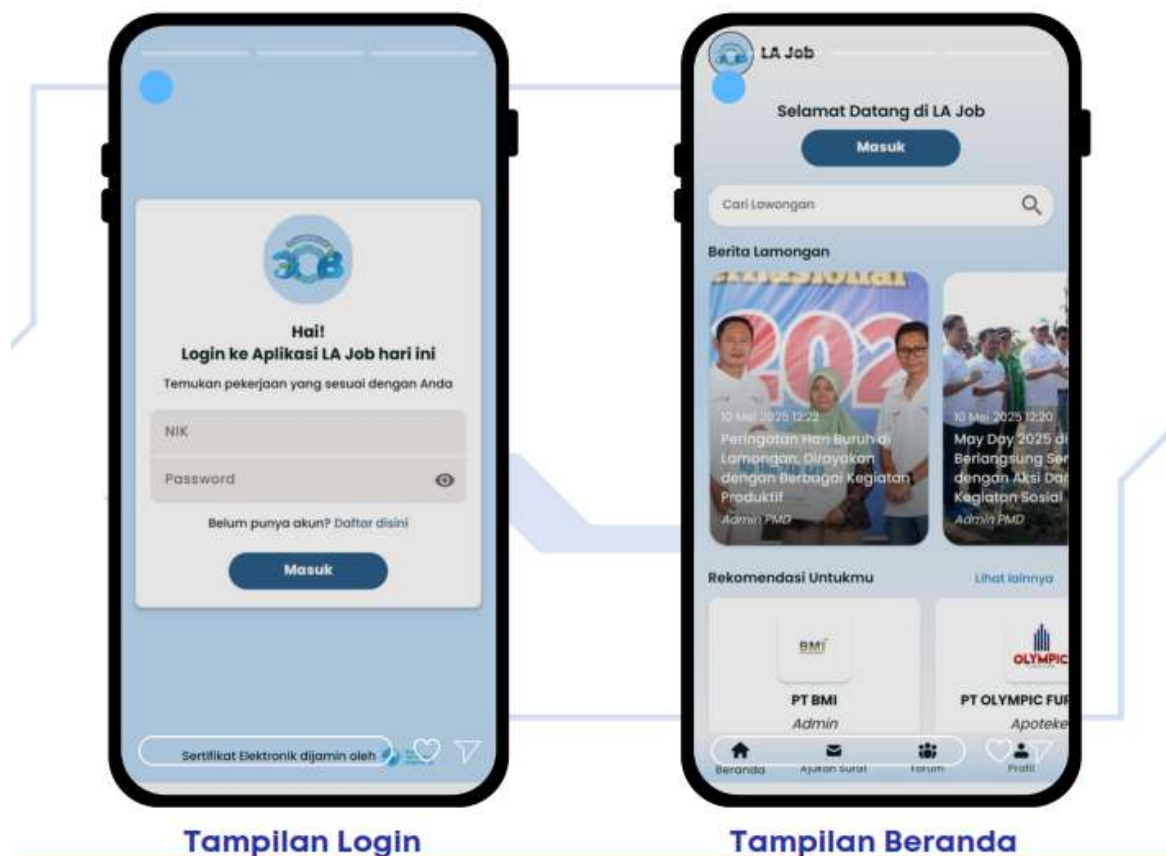
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Inovasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan

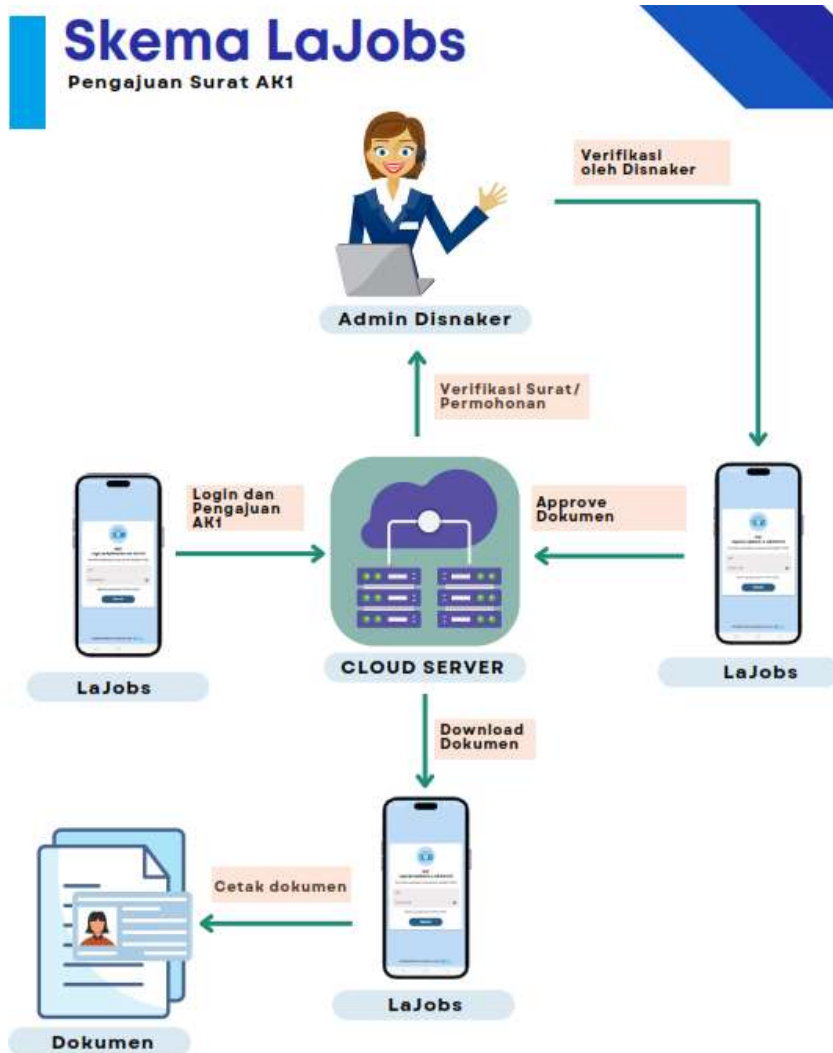
Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, akuntabilitas dan transparan melalui pembaharuan-pembaharuan atau yang sering disebut sebagai inovasi. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan mempunyai inovasi LaJobs. LaJobs adalah aplikasi yang akan membantu memudahkan masyarakat dalam mengajukan Surat AK1 (Kartu Kuning) secara online dan mendapatkan informasi lowongan kerja terbaru.

Fitur dalam Mobile Apps LaJobs antara lain yaitu Pengajuan Surat AK1 (Kartu Kuning), Pencarian Kerja Berdasarkan Kategori dan Lokasi, Forum Untuk Pekerja, dan Media Informasi Berita Daerah.

Berikut ini tampilan LaJob yaitu



Berikut ini skema LaJob dalam Pengajuan Surat AK1 (Kartu Kuning) yaitu



Penghargaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan

PENGHARGAAN K3 TINGKAT PROVINSI 2025



Terbaik IV kategori Zero Accident award (kecelakaan nihil)

Pemkab Lamongan bersama 63 perusahaan di Lamongan mendapat penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).



PENGHARGAAN TINGKAT KABUPATEN



- Juara 1 Bola Voli
- Juara 1 Lamongan Night Carnival
- Juara Harapan 3 Content Kreator



